

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk hidup adalah kebutuhan akan pangan, sehingga kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Permintaan akan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar, akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan hal tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu Negara.

Di Indonesia, permasalahan pangan tidak dapat dihindari, walaupun Indonesia sering disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia. Fakta yang terjadi dan merupakan salah satu permasalahan klasik terkait dengan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penyediaannya. Hal ini sesuai dengan teori Malthus yang menyebutkan bahwa pertumbuhan pangan yang mengikuti deret hitung, dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 244 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,49 persen per tahun. Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Berkurangnya lahan pertanian

yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan.

Dalam konteks mewujudkan Negara Indonesia menjadi Bangsa yang mandiri dalam bidang pangan, maka dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang yaitu bahwa pembangunan ketahanan pangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu, dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Istilah “ketahanan pangan” (*food security*) oleh Irawan (2006), didefinisikan sebagai akses dari semua penduduk di suatu negara/wilayah untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasar makanan yang cukup, yang dibutuhkan untuk bisa hidup secara layak (aktif dan sehat). Dalam hal ini, elemen terpenting dari ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan dan kemampuan untuk memperoleh kebutuhan makanan.

Pembangunan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan memperhatikan kinerja di tingkat nasional. Adanya perbedaan permasalahan potensi dan sumber daya di tiap daerah mengharuskan kebijakan pangan terutama mengenai ketahanan pangan perlu dilihat secara spesifik antar daerah di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan di suatu daerah tentu saja sangat dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Ketahanan pangan terutama ditentukan oleh nilai ekonomis beras, sebab beras merupakan komoditas paling

penting di Indonesia, terutama bagi kelompok sosial ekonomi rendah. Beras merupakan bahan makanan pokok bagi penduduk Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan dalam Bab VI Pasal 13 ayat 1 tertulis bahwa Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Jelas bahwa perlu adanya pengamatan secara regional tentang kasus ketahanan pangan dan kebijakan ketahanan pangan, sehingga penelitian ini akan meneliti kondisi ketahanan pangan di salah satu propinsi di Indonesia.

Propinsi Lampung adalah salah satu sentra produksi beras yang berada di luar pulau Jawa yang merupakan daerah penghasil padi nomor tujuh di Indonesia. Produksi yang dihasilkan mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi padi Propinsi Lampung 2010-2012

Komoditas	Satuan	2010	2011	2012
Padi	Ton	2.807.676	2.940.795	3.044.792
Padi Ladang	Ton	183.803	187.926	192.192
Padi Sawah	Ton	2.623.873	2.752.869	2.852.600

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2013

Perkembangan produksi dan produktivitas beras di Propinsi Lampung seperti yang tersaji pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa adanya tren positif peningkatan produksi, namun peningkatan produksi tersebut berjalan cukup lambat.

Pertumbuhan produktivitas yang rendah mencerminkan bahwa penerapan teknologi di tingkat petani sudah mendekati kejenuhan.

Persoalan dalam pembangunan pertanian yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani adalah soal permodalan. Permodalan merupakan salah satu faktor produksi paling penting dalam usahatani. Penggunaan sarana produksi yang optimal bisa terlaksana jika petani memiliki modal yang memadai. Akses petani terhadap sumber modal yang sifatnya formal umumnya relatif terbatas, padahal petani merupakan tumpuan sebagai aktor penghasil pangan yang menentukan ketahanan pangan di suatu wilayah.

Faktor permodalan telah terbukti berhasil meningkatkan pendapatan petani dan berdampak pada peningkatan produksi pangan pada masa lalu dalam hal pencapaian swasembada pangan. Peran pemerintah untuk meningkatkan produksi adalah menyediakan kredit program dengan suku bunga rendah, fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sampai dengan tahun 1998 dan subsidi sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida).

Semenjak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka tidak tersedia lagi sumber dana dari KLBI, oleh karena itu mulai tahun 2000 telah diluncurkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang sumber dananya berasal dari Perbankan dengan subsidi suku bunga bagi petani dan peternak yang disediakan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya KKP mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun, mulai Oktober 2007 KKP disempurnakan menjadi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Hal ini mengadopsi upaya mengurangi ketergantungan energi berbahan baku fosil dan perkembangan

teknologi energi dikembangkan energi lain yang berbasis sumber energi nabati. Energi alternatif dimaksud disini berbasis ubi kayu/singkong dan tebu diintegrasikan dengan Skim KKP yang telah ada sehingga berubah menjadi Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Awal penyaluran KKP-E dilakukan sesuai dengan mekanisme pencairan dan pengembalian KKP-E yang telah diatur. Bagi petani/peternak secara individu, kelompok ataupun melalui mitra usaha seperti koperasi dapat mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) atau menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh pertanian. Petani, peternak, kelompok tani mengembalikan kredit langsung kepada Bank pelaksana ataupun jika menggunakan mitra usaha maka dapat dikembalikan melalui mitra usaha (koperasi) yang bersangkutan. Selanjutnya setelah dana diterima oleh petani/peternak maka dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E berjalan lancar, aman dan terkendali serta dapat memberikan manfaat bagi penerimanya maka diperlukan adanya upaya-upaya pembinaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan secara rutin. Upaya pembinaan di tingkat pusat dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bersama instansi terkait lainnya dan Bank pelaksana KKP-E. pembinaan di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan Dinas Teknis berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan cabang Bank pelaksana setempat, sedangkan untuk kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi dilakukan oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi KKP-E (Tim Monev KKP-E).

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tanggamus sebagai sentra produksi beras dan sekaligus menjadi sasaran penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Kredit ini sangat diperlukan karena berdasarkan data pada Tabel 2, produktivitas padi di Kabupaten Pringsewu merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan adanya permodalan yang memadai maka akses petani terhadap teknologi dalam berusahatani akan semakin tercukupi.

Tabel 2. Luas panen, produksi dan produktivitas padi Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung tahun 2010-2011

Kabupaten kota	2010			2011		
	Luas panen (ha)	Produkti vitas (kw/ha)	Produksi (ton)	Luas panen (ha)	Produkti vitas (kw/ha)	Produksi (ton)
Lampung barat	39.480	43.17	170.457	39.919	44.05	175.853
Tanggamus	42.625	50.30	214.445	40.490	51.27	207.603
Lampung selatan	79.423	49.56	393.622	84.001	50.50	424.277
Lampung timur	89.845	50.04	449.662	90.252	51.00	460.359
Lampung tengah	127.020	49.10	623.779	140.004	50.06	700.944
Lampung utara	37.763	40.59	153.289	40.331	41.36	166.835
Way kanan	35.269	40.94	144.421	41.796	41.72	174.390
Tulang bawang	42.938	44.66	191.770	42.090	45.51	191.570
Pesawaran	28.266	50.54	142.859	29.514	51.50	152.021
Pringsewu	21.777	51.39	111.918	21.819	52.37	114.273
Mesuji	25.496	44.99	114.727	19.129	45.86	87.731
Tuba barat	14.438	44.15	63.748	11.378	45.31	51.557
Bandar lampung	1.852	51.49	9.536	1.658	52.79	8.754
Metro	4.416	53.08	23.443	4.592	54.42	24.998

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

Pada Tabel 2, dapat dilihat produktivitas padi dari setiap Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan. Kabupaten Pringsewu memiliki tingkat produktivitas padi tertinggi ketiga setelah Kota Metro dan Bandar Lampung. Ada lima Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan jumlah produksi yaitu, Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, Mesuji, tulang bawang Barat dan Kota Bandar Lampung. Hal ini lebih disebabkan karena berkurangnya luas panen pada Kabupaten/Kota tersebut.

Pada tahun 2005 Badan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung telah membuat peta, yang dikenal dengan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas/FIA*) yang menggambarkan kondisi kerawanan pangan yang dirinci sampai pada level kabupaten untuk 10 kabupaten/kota. Adapun Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas/FIA*) di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2 (lampiran 3). Pada gambar tersebut terlihat dalam peta komposit bahwa Kabupaten Pringsewu termasuk dalam daerah yang agak rawan pangan. Mengingat Kabupaten Pringsewu merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, terlihat dalam peta komposit tersebut Kabupaten Pringsewu berwarna merah tua dan merah muda yang artinya dalam status prioritas dua dan tiga. Di level kecamatan diperoleh informasi dari Badan Ketahanan Pangan bahwa Kecamatan Gadingrejo termasuk dalam kecamatan berstatus agak rawan pangan. Hal ini mengharuskan *stakeholder* setempat bertindak responsif untuk mengentaskan Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo dari status agak rawan pangan menjadi tahan pangan.

Berdasarkan status atau tingkat ketahanan pangan yang dilihat dari Peta Kerawanan Pangan dapat dijadikan alat untuk mendeteksi kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah dan sekaligus kerawanan pangan pada wilayah lain untuk mendapatkan intervensi yang tepat dengan harapan terjadi perubahan dimasa mendatang. Namun hal yang perlu diperhatikan bahwa ketahanan pangan di tingkat wilayah tidak sepenuhnya menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini ditunjukkan adanya fakta bahwa walaupun di tingkat nasional dan wilayah (propinsi) memiliki status tahan pangan, di tingkat

daerah/wilayah belum terjamin, hal ini dapat dibuktikan bahwa di wilayah tersebut masih ditemukan rumah tangga rawan pangan (Ilham, 2005).

Ketahanan pangan nasional terkait dengan ketahanan pangan di tiap-tiap rumah tangga yang menyangkut konsumsi pangan. Konsumsi pangan di tingkat rumah tangga erat hubungannya dengan ciri-ciri demografis, aspek sosial, ekonomi, serta potensi sumberdaya alam setempat (Sayekti, 2008). Indonesia terbagi ke dalam wilayah-wilayah yang secara historis mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, faktor kebiasaan yang berkaitan dengan unsur sosial budaya, lingkungan ekonomi, dan kebutuhan biologis yang mempengaruhi seseorang melakukan pemilihan jenis makanan yang mereka konsumsi.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan. Variabel sosial ekonomi rumah tangga akan mempengaruhi akses terhadap pangan. Bila akses terhadap pangan dapat tercapai dengan baik maka suatu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pangan, sehingga tingkat konsumsi rumah tangga dapat terpenuhi. Tingkat ketahanan pangan suatu rumah tangga petani dipengaruhi oleh harga pangan yang ada di pasaran. Semakin tinggi harga pangan yang ada, maka akan menyebabkan semakin sedikit pangan yang bisa dibeli dan ketersediaan pangan pun akan rendah, begitu juga sebaliknya.

Tingkat produksi padi yang dihasilkan oleh petani akan mempengaruhi tingkat ketersediaan pangan rumah tangga. Tingkat pendapatan akan menentukan daya beli dan akses suatu rumah tangga untuk menjangkau pangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat konsumsi energi dan ketahanan pangan rumah tangga tersebut. Pendidikan ibu rumah tangga terkait dengan tingkat pengetahuan untuk

memilih jenis makanan apa saja yang harus dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan energi anggota rumah tangga. Jumlah anggota rumah tangga akan mempengaruhi banyaknya dan jenis makanan yang dapat tersedia dan dimakan oleh anggota rumah tangga. Suku daerah ataupun etnis juga akan mempengaruhi tingkat kecukupan energi dari makanan yang diasup oleh suatu rumah tangga, hal ini dikarenakan berlakunya suatu sistem adat ataupun tradisi yang berkembang di masyarakat dengan suku daerah tertentu. Oleh karena itu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan menjadi penting untuk dijadikan objek yang harus secara kontinyu diteliti oleh para peneliti.

Sejauh ini, penelitian tentang bagaimana tingkat ketahanan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga masih cukup sedikit.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam bagaimana tingkat ketahanan rumah tangga petani padi penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kabupaten Pringsewu. Namun khusus untuk penelitian yang telah dilakukan, peneliti fokus hanya pada pengaruh KKP-E terhadap ketahanan pangan petani padi saja, sedangkan untuk Energi sebagai bagian dari KKP-E tidak akan menjadi subjek penelitian.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Bagaimana tingkat pendapatan petani padi penerima dan non penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kabupaten Pringsewu?

- (2) Bagaimana tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi penerima dan non penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kabupaten Pringsewu?
- (3) Faktor – faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi di Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- (1) Mengetahui tingkat pendapatan petani padi penerima dan non penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Mengetahui tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi penerima dan non penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Kabupaten Pringsewu.
- (3) Mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi di Kabupaten Pringsewu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- (1) Pemerintah, dan *stake Holders* atau pemangku kepentingan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penentuan dan perumusan kebijakan terkait upaya peningkatan ketahanan pangan di suatu wilayah.
- (2) Peneliti lain, sebagai informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.